

MEWUJUDKAN MASYARAKAT INFORMASI DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN STRATEGI DI INDONESIA

Building an Information Society in the Digital Era: Challenges and Strategies in Indonesia

Dwi Fitriana Cahyaningtyas¹

¹ Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Denpasar Indonesia

✉ Corresponding Author: dwicahyaningtyas@unud.ac.id

Received: 5 June 2026

Revised: 25 June 2026

Accepted: 28 June 2026

Published: 30 June 2026

Keywords:

information society, digital divide, digital literacy, information and communication technology.

Kata Kunci:

Masyarakat informasi, kesenjangan digital, literasi digital, Teknologi Informasi dan komunikasi.

Abstract

The development of information and communication technology (ICT) has accelerated the transition toward an information society, in which information becomes a strategic resource in social, educational, economic, and cultural life. However, the growth of internet use in Indonesia has not automatically produced an inclusive information society. This article analyzes the main challenges and strategies for developing an information society in Indonesia, with particular attention to the digital divide, digital literacy, ICT infrastructure, and the role of libraries as information and literacy institutions. This study uses a narrative literature review with thematic synthesis. Data were obtained from academic books, journal articles, institutional reports, and policy documents relevant to the concepts of information society, digital divide, digital literacy, and information access. The findings indicate that the development of Indonesia's information society is constrained by regional disparities in ICT infrastructure, unequal access to information resources, low digital literacy, and differences in education and socioeconomic capacity. The novelty of this article lies in its integrated synthesis of three dimensions—digital access, digital literacy, and library-based information services—as a framework for understanding inclusive information-society development in Indonesia. The article argues that strengthening ICT infrastructure must be accompanied by systematic literacy programs, inclusive information services, and collaboration among government, educational institutions, libraries, communities, and the private sector.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mempercepat transisi menuju masyarakat informasi, yaitu kondisi ketika informasi menjadi sumber daya strategis dalam kehidupan sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya. Namun, peningkatan penggunaan internet di Indonesia belum secara otomatis membentuk masyarakat informasi yang inklusif. Artikel ini bertujuan menganalisis tantangan dan strategi pembangunan masyarakat informasi di Indonesia, dengan perhatian khusus pada kesenjangan digital, literasi digital, infrastruktur TIK, serta peran perpustakaan sebagai lembaga informasi dan literasi. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka naratif dengan sintesis tematik. Data diperoleh dari buku akademik, artikel jurnal, laporan lembaga, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan konsep masyarakat informasi, kesenjangan digital, literasi digital, dan akses informasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat informasi di Indonesia masih menghadapi kendala berupa ketimpangan infrastruktur TIK antarwilayah, ketidakmerataan akses terhadap sumber informasi, rendahnya literasi digital, serta perbedaan kapasitas pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat. Kebaruan artikel ini terletak pada sintesis terpadu antara dimensi akses digital, literasi digital, dan layanan informasi berbasis perpustakaan sebagai kerangka untuk memahami pembangunan masyarakat informasi yang inklusif di Indonesia. Artikel ini menegaskan bahwa

penguatan infrastruktur TIK perlu diikuti dengan program literasi yang sistematis, layanan informasi inklusif, dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, perpustakaan, masyarakat, dan sektor swasta.



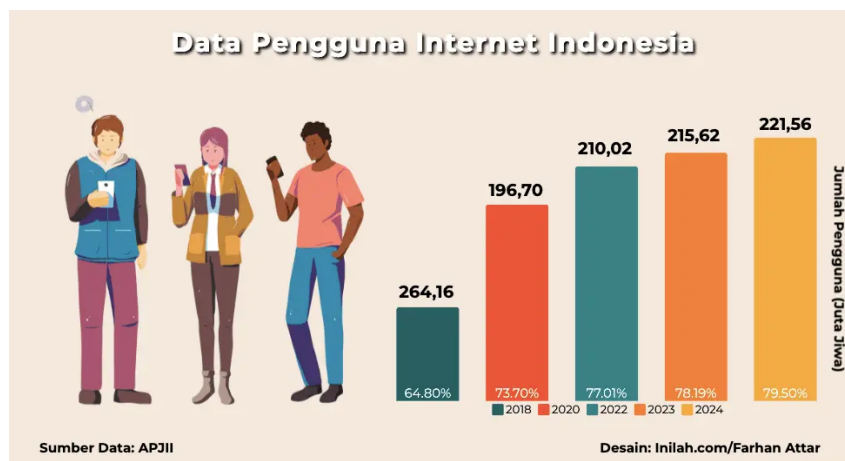
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan informasi. Kemajuan internet, perangkat digital, serta jaringan komunikasi modern menciptakan lingkungan sosial yang semakin bergantung pada informasi sebagai sumber daya utama. Dalam konteks ini, informasi tidak lagi berfungsi sekadar sebagai pendukung aktivitas manusia, tetapi menjadi sumber daya strategis yang menentukan daya saing individu, organisasi, dan negara (Castells, 2021).

Transformasi tersebut mendorong lahirnya konsep masyarakat informasi (information society), yaitu kondisi ketika produksi, distribusi, dan pemanfaatan informasi menjadi aktivitas utama dalam kehidupan masyarakat (Webster, 2014). Pada masyarakat informasi, teknologi digital menjadi infrastruktur utama yang memungkinkan pertukaran informasi berlangsung cepat, luas, dan melampaui batas geografis. Inovasi seperti internet, komputasi awan, big data, kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan platform digital turut mengubah pola interaksi sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya masyarakat modern (Sugihartati, 2022).

Peningkatan penggunaan internet menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat pembentukan masyarakat informasi. Laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan tren positif penetrasi internet dalam lima tahun terakhir. Sejak 2018, penetrasi internet Indonesia mencapai 64,8%, kemudian meningkat menjadi 73,7% pada 2020, 77,01% pada 2022, dan 78,19% pada 2023.



Gambar 1. Data Pengguna Internet Indonesia 2018-2024

Sumber: <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>

Meningkatnya jumlah pengguna internet membuka peluang bagi perluasan akses informasi, layanan publik digital, pendidikan daring, dan ekonomi digital. Namun, tingginya penetrasi internet belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan akses dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi. Sejumlah kajian menunjukkan masih adanya kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan, antara Indonesia bagian barat dan timur, serta antara kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang berbeda. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada 2020 sebanyak 46.486 desa atau 55,3%

dari total desa di Indonesia belum terjangkau menara pemancar jaringan telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS) (Irawanto et al., 2022).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat informasi tidak cukup dilakukan melalui penyediaan infrastruktur teknologi. Pembangunan masyarakat informasi juga memerlukan penguatan literasi digital, kemampuan memanfaatkan informasi, kesiapan sumber daya manusia, dan pemerataan akses terhadap sumber informasi. Tanpa penguatan unsur-unsur tersebut, kemajuan teknologi justru berpotensi memperluas kesenjangan sosial dan kesenjangan informasi di masyarakat.

Berdasarkan persoalan tersebut, kajian mengenai tantangan pembangunan masyarakat informasi di Indonesia penting dilakukan. Artikel ini bertujuan menganalisis tantangan yang dihadapi Indonesia dalam membangun masyarakat informasi, terutama yang berkaitan dengan kesenjangan digital, literasi digital, infrastruktur TIK, dan peran perpustakaan. Kebaruan artikel ini terletak pada upaya menyintesis tiga dimensi yang sering dibahas secara terpisah, yaitu akses digital, literasi digital, dan layanan informasi berbasis perpustakaan, sebagai kerangka untuk memahami strategi pembangunan masyarakat informasi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka naratif (narrative literature review) dengan sintesis tematik. Metode ini dipilih karena artikel bertujuan menghimpun, membandingkan, dan menyintesis berbagai pandangan ilmiah mengenai masyarakat informasi, teknologi informasi dan komunikasi, kesenjangan digital, literasi digital, dan layanan informasi. Tinjauan pustaka dalam artikel ini tidak dimaksudkan sebagai systematic literature review, tetapi sebagai kajian konseptual yang menekankan pemetaan isu utama dan perumusan strategi berbasis literatur yang relevan (Febrianto et al., 2024).

Sumber data diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, laporan lembaga nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan transformasi digital. Literatur dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dengan empat tema utama, yaitu konsep masyarakat informasi, kesenjangan digital, literasi digital, dan peran perpustakaan dalam perluasan akses informasi. Data dianalisis melalui beberapa tahap: identifikasi literatur, pembacaan kritis, pengelompokan gagasan utama, pembentukan tema, dan sintesis hubungan antartema. Hasil sintesis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk merumuskan tantangan dan strategi pembangunan masyarakat informasi di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Masyarakat Informasi

Konsep information society atau masyarakat informasi mulai berkembang pada 1970-an ketika terjadi peralihan dari masyarakat industri menuju masyarakat berbasis informasi. Istilah ini merujuk pada kondisi ketika produksi, distribusi, dan pemanfaatan informasi menjadi aktivitas utama dalam sektor sosial dan ekonomi. Rogers (2003) menjelaskan bahwa masyarakat informasi adalah masyarakat yang sebagian besar tenaga kerjanya terdiri atas pekerja informasi dan informasi menjadi unsur paling penting. Dalam konteks ini, pekerja informasi dapat dipahami sebagai individu yang terlibat dalam kegiatan membuat, mengolah, menyampaikan, dan mengembangkan teknologi informasi.

Selain itu, Damanik (2012) menjelaskan bahwa masyarakat informasi menggambarkan kelompok masyarakat yang menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial dengan dukungan teknologi komunikasi dan informasi. Informasi menjadi sumber daya bernilai karena penguasaan informasi dapat mendorong kreativitas, inovasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan teknologi dan kemampuan memanfaatkan informasi merupakan unsur penting dalam pembentukan masyarakat informasi.

Sutarno (2005) menyebutkan beberapa ciri masyarakat informasi, antara lain akses informasi yang inklusif, tingginya kesadaran dan keterbukaan masyarakat terhadap teknologi, perluasan layanan perpustakaan, optimalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tata kelola informasi yang strategis, tepat waktu, dan bernilai ekonomis.

Perkembangan teknologi digital yang semakin cepat di Indonesia membuka peluang untuk membangun masyarakat informasi. Namun, transformasi ini masih menghadapi sejumlah masalah, seperti keterbatasan akses informasi, rendahnya literasi digital, dan belum meratanya pemanfaatan teknologi di berbagai wilayah. Karena itu, pembangunan masyarakat informasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan informasi secara efektif.

3.2 Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembentukan Masyarakat Informasi

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memegang peranan penting sebagai pilar dasar dalam mewujudkan masyarakat informasi. Kehadiran internet, perangkat digital, serta platform komunikasi modern memfasilitasi masyarakat dalam mengakses, mendokumentasikan, mengolah, dan mendistribusikan data secara lebih efektif dan efisien. Masyarakat informasi bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi karena teknologi memungkinkan informasi diproduksi, disimpan, dipertukarkan, dan dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam masyarakat informasi, TIK dapat digunakan untuk memperluas akses informasi, meningkatkan komunikasi, mendukung pembelajaran, membuka peluang ekonomi digital, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial. Selain itu, TIK memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara real time sehingga proses pengambilan keputusan dapat berlangsung lebih cepat dan akurat (World Bank, 2016).

Jumlah pengguna internet di Indonesia dan penggunaan berbagai layanan digital menunjukkan perkembangan TIK yang cukup pesat. Untuk mempercepat pembentukan masyarakat informasi, pemerintah mendorong transformasi digital melalui pengembangan infrastruktur telekomunikasi, layanan pemerintah berbasis elektronik, pendidikan digital, dan ekonomi digital. Namun, manfaat TIK belum dirasakan secara merata. Keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah, disparitas pendidikan, dan rendahnya literasi digital masih menjadi hambatan utama. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat informasi membutuhkan ketersediaan teknologi sekaligus kemampuan masyarakat untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi. Transformasi digital juga menjadi salah satu prioritas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), terutama dalam pemerataan infrastruktur dan integrasi layanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

3.3 Kesenjangan Digital sebagai Tantangan Utama

Salah satu tantangan terbesar menuju masyarakat informasi adalah kesenjangan digital (*digital divide*). Dalam hal ini merujuk pada perbedaan dalam kemampuan seseorang atau kelompok untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi informasi. Kesenjangan digital di Indonesia merupakan isu multidimensional, dalam lima tahun terakhir, jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat. Survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024) menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet mencapai sekitar **79,5% pada tahun 2024**, meningkat dibandingkan sekitar **73,7% pada tahun 2020**, hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan infrastruktur digital nasional. Peningkatan tersebut, bagaimanapun, belum merata. Akses internet di daerah perkotaan Pulau Jawa masih jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah pedesaan, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan sebagian Kalimantan. Masyarakat di daerah ini masih menghadapi keterbatasan jaringan, kecepatan internet yang rendah, dan biaya yang relatif tinggi untuk akses internet (OECD, 2024). Hal ini juga diperkuat dengan keadaan global, di mana menurut (International Telecommunication Union (ITU), 2025) sekitar 2,2 miliar orang di seluruh dunia masih belum terhubung ke internet secara offline pada 2025. Pada tahun 2025, sekitar 6 miliar

orang atau 75% populasi dunia telah menggunakan internet, meningkat dari 5,8 miliar pengguna pada tahun 2024.

Menurut Van Dijk (2006) *digital divide* terbagi menjadi empat; digital tingkat satu yaitu dimensi motivasi dan akses fisik material atau kepemilikan teknologi (*Motivational Access*). Selanjutnya, kesenjangan digital tingkat dua mencakup akses TIK, penggunaan TIK, dan frekuensi atau perbedaan akses internet (*Material/Physical Access*). Yang selanjutnya adalah Akses Keterampilan (*Skills Access*) dalam hal ini Van Dijk membagi keterampilan digital menjadi *Operational skills* (mengoperasikan perangkat), *Information skills* (mencari dan mengevaluasi informasi) serta *Strategic skills* (menggunakan informasi untuk mencapai tujuan tertentu). Pada dimensi terakhir yaitu merupakan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi (*Usage Access*)

Di sisi lain, Ragnedda dan Ruiu menegaskan bahwa disparitas digital tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap infrastruktur TIK. Kesenjangan digital juga mencakup ketidakmerataan motivasi dan keterampilan pada level pertama, perbedaan tujuan penggunaan pada level kedua, serta ketidakmerataan dampak sosial dan ekonomi pada level ketiga. Dengan demikian, seseorang yang sudah memiliki akses internet belum tentu mampu memanfaatkan teknologi untuk peningkatan pengetahuan, produktivitas, atau kesejahteraan (Ragnedda & Ruiu, 2017).

Kondisi tersebut juga tampak di Indonesia. Kesenjangan digital tidak hanya terlihat dari perbedaan akses fisik, tetapi juga dari aspek ekonomi dan pendidikan. Pertama, kesenjangan infrastruktur terlihat dari perbedaan kualitas jaringan antara wilayah perkotaan dan wilayah terpencil (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021). Kedua, kesenjangan ekonomi memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memiliki perangkat digital dan membayar akses internet. Ketiga, kesenjangan pendidikan menentukan kemampuan seseorang dalam memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi yang tersedia di lingkungan digital.

3.4 Literasi Digital dalam Masyarakat Informasi

Selain akses terhadap teknologi, literasi digital merupakan komponen penting dalam masyarakat informasi. Literasi digital mencakup kemampuan mencari, mengevaluasi, memahami, menggunakan, dan memproduksi informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Menurut (Isnaini et al., 2025), rendahnya literasi digital dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti lemahnya kemampuan verifikasi informasi, meningkatnya penyebaran hoaks, penyalahgunaan media sosial, serta meningkatnya kerentanan terhadap risiko keamanan digital.

Oleh karena itu, penguatan literasi digital menjadi strategi penting dalam membangun masyarakat informasi yang berkualitas. Tantangan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyediakan jaringan internet. Masyarakat perlu dibekali kemampuan menentukan kebutuhan informasi, menilai kredibilitas sumber, membandingkan berbagai informasi, memahami etika digital, dan menggunakan teknologi untuk aktivitas produktif. Literasi digital yang kuat akan membantu masyarakat menjadi pengguna informasi yang kritis, bukan sekadar konsumen pasif teknologi.

3.5 Peran Perpustakaan dalam Mendukung Masyarakat Informasi

Perpustakaan sebagai pusat literasi informasi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat informasi. Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia koleksi dan akses informasi, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran, pusat literasi digital, dan mediator antara masyarakat dengan sumber informasi yang kredibel. (UNESCO, 2023) menegaskan bahwa perpustakaan publik berperan penting dalam mendukung akses informasi, pembelajaran sepanjang hayat, dan inklusi sosial.

Dengan demikian, pembangunan masyarakat informasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi secara produktif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga

pendidikan, perpustakaan, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mempercepat terwujudnya masyarakat informasi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

3.6 Upaya Mewujudkan Masyarakat Informasi

Untuk mewujudkan masyarakat informasi yang inklusif dan berkelanjutan, terdapat beberapa strategi utama yang perlu dilakukan. Pertama, peningkatan kualitas pendidikan sebagai dasar pembentukan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pemanfaatan informasi. Kedua, penguatan literasi digital dan literasi informasi agar masyarakat mampu mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Ketiga, penguatan peran perpustakaan dan pusat informasi sebagai penyedia akses, pelatihan, dan pendampingan literasi. Keempat, pengembangan budaya belajar sepanjang hayat. Kelima, pemanfaatan teknologi untuk kegiatan produktif, seperti pendidikan, ekonomi digital, layanan publik, dan inovasi sosial. Keenam, kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk memastikan pembangunan masyarakat informasi berjalan inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pembangunan masyarakat informasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara efektif. Strategi pembangunan perlu dilakukan secara terpadu melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan akses informasi, penguatan literasi digital, dan pengembangan ekosistem informasi yang memungkinkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Melalui strategi tersebut, Indonesia berpeluang mempercepat terwujudnya masyarakat informasi yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing.

4. SIMPULAN

Masyarakat informasi merupakan fase perkembangan sosial ketika informasi menjadi sumber daya strategis dalam berbagai aspek kehidupan. Transformasi menuju masyarakat informasi didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tetapi keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi.

Kajian ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan utama, yaitu kesenjangan digital antarwilayah, keterbatasan infrastruktur TIK, rendahnya literasi digital, ketimpangan akses informasi, serta perbedaan kapasitas pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat informasi perlu diarahkan pada pemerataan akses, peningkatan kapasitas manusia, dan penguatan ekosistem informasi yang inklusif.

Kontribusi utama artikel ini adalah menempatkan akses digital, literasi digital, dan layanan informasi berbasis perpustakaan sebagai tiga dimensi yang saling terkait dalam pembangunan masyarakat informasi. Oleh karena itu, strategi yang diperlukan meliputi penguatan infrastruktur TIK, peningkatan literasi digital dan informasi, perluasan peran perpustakaan, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, perpustakaan, komunitas, dan sektor swasta. Dengan strategi tersebut, pembangunan masyarakat informasi di Indonesia dapat diarahkan menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

-
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). *APJII: Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://web.apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Castells, M. (2021). *The Rise of the Network Society: Volume 1 of The Information Age: Economy, Society, and Culture* (2nd ed.). Blackwell Publishing.
- Damanik, F. N. S. (2012). *Menjadi Masyarakat Informasi*. 13(01). <https://media.neliti.com/media/publications/280897-menjadi-masyarakat-informasi-080f871d.pdf>

- Febrianto, A., A Siroj, R., & Hartatiana. (2024). Studi Literatur: Landasan Dalam Memilih Metode Penelitian Yang Tepat. *Journal Educational Research and Development*, 01(02). <https://doi.org/10.62379/jerd.v1i2.142>
- International Telecommunication Union (ITU). (2025). *Global number of Internet users increases, but disparities deepen key digital divides*. International Telecommunication Union (ITU).
- Irawanto, D. S., Gunawan, H., M.G, R., Hassyati, A., & Megarani, A. (2022). *Kesenjangan Digital di Indonesia* (Laporan Tahunan No. 148). Datanesia. https://drive.google.com/file/d/1GIWYRL-n7DqBli_U02-pp65U8h5F7XT6/view
- Isnaini, Nasyiriyah, T., Istighfari, N. A., & Rohmah, S. (2025). The Role of Digital Literacy in Social Media. *Universitas Ahmad Dahlan*, 6(1). <https://doi.org/10.12928/mms.v6i1.12242>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). Retrospeksi 2021. https://jdih.komdigi.go.id/storage/file-artikel-hukum/1686121773-KOMINFONEXT_EDISI_36_DESEMBER_2021.pdf
- OECD. (2024). *Extending Broadband Connectivity in Southeast Asia*. https://www.oecd.org/en/publications/extending-broadband-connectivity-in-southeast-asia_b8920f6d-en.html
- Ragnedda, M., & Ruii, M. L. (2017). Social capital and the three levels of digital divide. In *Theorizing Digital Divides*. Routledge.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovation* (5th ed.). The Free Press.
- Sugihartati, R. (2022). *Paradoks Perkembangan masyarakat informasi: Antara Literasi dan Kesenjangan Digital* [Speech]. Professor Inauguration, Surabaya. <https://repository.unair.ac.id/126021/1/KKB%20KK-2%20PG.01-23%20Rah%20p.pdf>
- Sutarno, N. (2005). Tanggung Jawab Perpustakaan dalam Mengembangkan Masyarakat Informasi. Panta Rei.
- UNESCO. (2023). Updated Public Library Manifesto 2022 generates global and national impact on public libraries. UNESCO. <https://www.unesco.org/en/articles/updated-public-library-manifesto-2022-generates-global-and-national-impact-public-libraries?hub=722>
- Van Dijk, J. A. G. M. (2006). Digital divide research, achievement, and shortcomings. *Poetics*. <https://doi.org/10.1016/j.poetic.2006.05.004>
- Webster, F. (2014). *Theories of the Information Society* (4th ed.). Routledge.
- World Bank. (2016). *World Development Report 2016: Digital Dividends*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016>